

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MELAWI: ANALISIS PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, SUMBER DAYA, DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Firdaus Rinaldi^{1*}, Lidya Indriani^{2*}

^{1*} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: Firdaus.rinaldi13@gmail.com

^{2*} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: lidyaindriani88@gmail.com

Abstract: *This study aims to describe and analyze women's empowerment programs implemented by the Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Office (DP2KBP3A) of Melawi Regency. The research focuses on work program planning, program implementation, resources, and performance achievements. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving key informants consisting of the Head of the Agency, the Head of the Women's Empowerment Division, the Head of the Women's Empowerment Subdivision, and women from the community.*

The findings indicate that work program planning has been carried out by considering the needs and aspirations of women through coordination with community organizations such as PKK, Dharma Wanita, and the Women's Organizations Association. The implementation of women's empowerment programs includes education and literacy activities, health and nutrition programs, skills training, economic empowerment initiatives, as well as gender equality and women's protection campaigns. However, the implementation process still faces several challenges, particularly limited human resources, operational budgets, facilities and infrastructure, and accessibility to remote areas. The performance achievements of the women's empowerment programs are considered fairly satisfactory, as reflected in the increased participation of women in economic and social activities and improved access to training and capacity-building opportunities. Therefore, greater resource support, stronger inter-agency coordination, and broader community outreach are needed to optimize the implementation of women's empowerment programs.

Keywords: *Women's Empowerment; DP2KBP3A; Work Program; Resources; Melawi Regency.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Melawi. Fokus penelitian meliputi penyusunan program kerja, pelaksanaan program kerja, sumber daya, dan capaian kinerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kepala Subbidang Pemberdayaan Perempuan, dan masyarakat (kaum perempuan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan program kerja telah dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi perempuan melalui koordinasi dengan berbagai

organisasi kemasyarakatan seperti PKK, Dharma Wanita, dan Gabungan Organisasi Wanita. Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan literasi, kesehatan dan gizi, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, serta sosialisasi kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia, anggaran operasional, sarana dan prasarana, serta akses ke wilayah yang sulit di jangkau. Capaian kinerja program pemberdayaan perempuan dinilai cukup baik, ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial serta meningkatnya akses terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan sumber daya, penguatan koordinasi antar instansi, dan perluasan sosialisasi agar program pemberdayaan perempuan dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan; DP2KBP3A; Program Kerja; Sumber Daya

PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan sebuah gerakan dan proses berkelanjutan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, membangun peradaban, dan mewujudkan kemandirian masyarakat. Secara spesifik, pemberdayaan perempuan didefinisikan sebagai proses penyadaran (*awareness creation*) dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) guna mendorong partisipasi aktif, akses kontrol atas keputusan strategis, serta tindakan transformatif demi mewujudkan kesetaraan gender yang substantif (Kabeer 2017; *World Bank* 2020). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kesadaran kolektif. Dalam perspektif administrasi publik modern, efektivitas pemberdayaan sangat bergantung pada integrasi antara komitmen kelembagaan (*institutional commitment*) dan

keterlibatan komunitas lokal (*community engagement*) (Ansell dan Gash 2018).

Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Melawi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyerasian kebijakan operasional, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan program pemberdayaan serta peningkatan kualitas hidup perempuan. Pemerintah Kabupaten Melawi merancang program teknis yaitu Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan untuk mendorong terwujudnya kebijakan yang responsif gender (*gender-responsive policy*) serta berorientasi pada perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan.

Namun, berdasarkan hasil pra-penelitian, pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan fundamental. Program pemberdayaan perempuan kerap kali terpinggirkan (*marginalized*) akibat masih kuatnya bias

gender dan stereotip sosio-kultural pada skala birokrasi maupun publik (Cornwall 2016). Selain itu, keterbatasan alokasi anggaran (budgetary constraints) menjadi kendala utama yang mereduksi kapasitas operasional dinas, di mana anggaran penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan hanya dialokasikan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk melayani seluruh wilayah kabupaten selama satu tahun. Fenomena keterbatasan sumber daya fiskal ini menciptakan ketimpangan mendasar antara beban kerja ideal (*ideal workload*) dan realita implementasi (*real implementation*) (Bryson 2018). Ketiadaan sarana prasarana penunjang, seperti kendaraan operasional roda empat, semakin memperluas rentang kendali (*span of control*) dan memperlambat mobilitas pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak di daerah-daerah terpencil. Walaupun demikian, potensi pemberdayaan berbasis komunitas (community-based empowerment) terus digerakkan melalui sinergi jaringan sosial dengan Penggerak PKK dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam pembuatan produk usaha ekonomi produktif.

Konsep pemberdayaan masyarakat secara teoretis bersandar pada penguatan kapasitas, aksesibilitas, partisipasi, dan keadilan sosial (Ife 2016). Tahapan pemberdayaan yang ideal bergerak dari fase penyadaran (*awakening*), peningkatan kapasitas (*capacity building*), hingga pemberian wewenang (*empowering*) demi tercapainya kemandirian yang berkelanjutan (Mardikanto dan Soebiato

2017). Lebih lanjut, pemberdayaan mencakup dua dimensi strategis: dimensi internal yang berfokus pada transformasi kesadaran kritis serta kemandirian individu, dan dimensi eksternal yang menekankan pada reformasi kebijakan (*policy reform*), advokasi hukum, serta perluasan partisipasi publik (Rappaport 2017; Cattaneo dan Chapman 2015). Dalam konteks manajemen publik, penyusunan dan pelaksanaan program yang efektif menuntut adanya perencanaan strategis berorientasi hasil (*result-based planning*), ketercukupan sumber daya (*resource adequacy*), serta pengukuran capaian kinerja secara kontinu (Nugroho 2021; Robbins dan Coulter 2018).

Dengan demikian, pemberdayaan perempuan dalam penelitian ini dianalisis melalui keterkaitan antara dimensi substantif pemberdayaan dan proses penyelenggaraan program pemerintah. Dimensi akses, kapasitas, partisipasi, agency, dan pencapaian menjadi landasan untuk memahami substansi pemberdayaan, sedangkan penyusunan program, pelaksanaan program, sumber daya, dan capaian kinerja digunakan sebagai fokus operasional untuk menelusuri bagaimana proses pemberdayaan tersebut direncanakan, dilaksanakan, didukung, dan menghasilkan perubahan bagi perempuan. Hubungan tersebut menjadi dasar analisis penelitian agar pembahasan tidak berhenti pada aspek administratif program, tetapi tetap menilai kontribusinya terhadap proses pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan latar belakang empiris

dan teoretis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam pemberdayaan perempuan pada DP2KBP3A Kabupaten Melawi yang ditinjau dari empat aspek utama: (1) penyusunan program kerja, (2) pelaksanaan program kerja, (3) sumber daya, dan (4) capaian kinerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif dan memberikan pemahaman mendalam mengenai fakta-fakta fenomena pemberdayaan perempuan di DP2KBP3A Kabupaten Melawi.

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, keterlibatan, dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di DP2KBP3A Kabupaten Melawi. Informan penelitian terdiri atas tiga orang informan dari unsur pemerintah, yaitu Kepala DP2KBP3A Kabupaten Melawi, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Kepala Subbidang Pemberdayaan Perempuan, serta dua orang perempuan sebagai sasaran program pemberdayaan.

Pemilihan dua informan perempuan dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) merupakan perempuan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Melawi; (2) pernah mengikuti atau memperoleh manfaat

dari program/kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan atau difasilitasi oleh DP2KBP3A; (3) memiliki pengalaman langsung dalam kegiatan seperti pelatihan keterampilan, kegiatan pemberdayaan ekonomi, kegiatan organisasi perempuan, atau kegiatan peningkatan kapasitas; dan (4) bersedia memberikan informasi mengenai pengalaman, manfaat, akses, partisipasi, serta kendala yang dihadapi dalam mengikuti program.

Dua informan perempuan tersebut tidak dimaksudkan sebagai representasi statistik dari seluruh perempuan yang berada di 11 kecamatan dan 169 desa di Kabupaten Melawi. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan didasarkan pada kedalaman dan relevansi informasi yang diberikan terhadap fokus penelitian. Oleh karena itu, kecukupan informan ditentukan berdasarkan ketercukupan informasi untuk menjelaskan empat fokus penelitian, yaitu penyusunan program kerja, pelaksanaan program kerja, sumber daya, dan capaian kinerja. Informasi dari perempuan sasaran digunakan sebagai perspektif penerima manfaat untuk melengkapi informasi dari pihak penyelenggara program.

Kecukupan data selanjutnya diperoleh melalui perbandingan informasi antarinforman, observasi, dan dokumentasi. Apabila informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang relatif konsisten dan mampu menjelaskan fokus penelitian, maka data dinilai telah memadai untuk kebutuhan analisis penelitian. Informan penelitian terdiri dari:

1. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Melawi,
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A,
3. Kepala Subbidang Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A,
4. Masyarakat (kaum perempuan/sasaran program) sebanyak 2 orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi terkait peraturan perundang-undangan serta data kinerja dinas. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, serta perekam elektronik. Teknik analisis data yang diterapkan adalah model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup tiga tahapan utama:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*): Proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumen.
2. Penyajian Data (*Data Display*): Menyajikan data terstruktur dalam bentuk teks naratif, tabel, atau bagan untuk memudahkan penarikan kesimpulan.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*): Merumuskan makna dari data yang dikumpulkan serta memverifikasi keabsahan dan validitas temuan secara berkelanjutan selama penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan temuan lapangan beserta analisis komprehensif mengenai pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Melawi, khususnya pada Bidang Pemberdayaan Perempuan. Luasnya wilayah Kabupaten Melawi yang mencapai 10.640,80 km² mencakup 11 kecamatan dan 169 desa serta total populasi sebanyak 178.645 jiwa (91.529 laki-laki dan 87.116 perempuan) menjadi gambaran demografis sekaligus tantangan geografis tersendiri bagi instansi yang berkedudukan di Jalan Provinsi Kota Baru KM 5, Nanga Pinoh ini.

Guna memberikan pemahaman yang sistematis dan mendalam, analisis hasil penelitian ditelaah melalui empat fokus utama, yaitu: penyusunan program kerja, dinamika pelaksanaan di lapangan, ketersediaan sumber daya, serta realisasi capaian kinerja

1. Penyusunan Program Kerja

Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memberikan ruang bagi penyampaian kebutuhan dan aspirasi perempuan melalui keterlibatan organisasi mitra, kelompok perempuan, kader, dan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program. Aspirasi tersebut

menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas, keterampilan, kemandirian ekonomi, dan peningkatan peran perempuan dalam masyarakat.

Namun, partisipasi langsung perempuan dari masyarakat umum dalam proses perencanaan dan evaluasi program masih terbatas. Organisasi mitra telah berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, tetapi keterlibatannya belum sepenuhnya dapat merepresentasikan seluruh perempuan sasaran karena adanya keragaman karakteristik sosial, ekonomi, usia, pekerjaan, dan wilayah. Dengan demikian, program dapat dinilai telah mengakomodasi sebagian kebutuhan dan aspirasi perempuan melalui mekanisme representasi organisasi dan kelompok masyarakat, tetapi belum sepenuhnya menjamin keterwakilan aspirasi seluruh kelompok perempuan sasaran.

Untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan, diperlukan penguatan mekanisme partisipasi langsung melalui forum konsultasi perempuan, diskusi kelompok terarah, penjangkaran aspirasi secara berkala, serta pelibatan perempuan dari berbagai kelompok dan wilayah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Melawi mengacu pada rencana strategis jangka menengah (2020–2025). Dalam proses penyusunannya, penyusunan rancangan

program telah dimulai sejak tahun sebelumnya (tahun 2023). Walaupun partisipasi langsung masyarakat umum masih terbatas, koordinasi erat dilakukan dengan berbagai organisasi wanita mitra pemerintah, seperti Penggerak PKK, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dharma Wanita Persatuan, dan Forum PUSPA. Selain itu, penjangkaran aspirasi diawali dari tingkat desa melalui Musrenbangdes dan Musdes.

Terdapat 7 program kerja utama yang dirancang pada Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Tabel 1. Data Program Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Melawi

	Jenis Program Kerja
1	Pengarusutamaan Gender (PUG)
2	Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Melawi
3	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
4	Kegiatan GMS dan <i>Minigrant</i>
5	Kegiatan Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu
6	Peningkatan Kapasitas Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
7	Peningkatan Kapasitas Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Melawi

Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Melawi (2024)

Penyusunan program ini telah selaras dengan pandangan Siagian (2003) mengenai efektivitas perencanaan yang luwes dan berorientasi pada kebutuhan.

Namun demikian, ketersediaan alokasi anggaran yang sangat terbatas dalam DPA sering kali menjadi penghambat utama realisasi penyusunan program secara ideal.

2. Pelaksanaan Program Kerja

Pelaksanaan program kerja direalisasikan melalui kerja sama lintas sektor dengan OPD terkait, LSM (seperti Wahana Visi Indonesia, Gemawan), pihak perbankan, dan dunia usaha. Bentuk-bentuk kegiatan konkret yang dilaksanakan meliputi:

1. Pendidikan dan Literasi: Pelatihan keterampilan usaha kreatif rumah tangga (pengolahan pangan lokal, menjahit, menganyam).
2. Kesehatan dan Gizi: Sosialisasi pencegahan stunting melalui gerakan konsumsi telur bagi balita dan peningkatan gizi ibu hamil.
3. Ekonomi dan Koperasi: Pembentukan kelompok wanita tani dan usaha ekonomi produktif berbasis lokal.
4. Perlindungan dan Advokasi Hukum: Kampanye kesetaraan gender, sosialisasi pencegahan KDRT, serta pemberian layanan mediasi dan pendampingan korban kekerasan.

Kendala utama yang dihadapi saat pelaksanaan lapangan adalah minimnya sarana mobilitas (terutama kendaraan roda empat untuk penanganan kasus) serta luasnya geografis rentang kendali yang harus menempuh jalur sungai untuk mencapai desa-desa terpencil.

3. Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana merupakan faktor krusial dalam efektivitas implementasi kebijakan (Sutrisno 2012). DP2KBP3A Kabupaten Melawi memiliki total 18 orang pegawai untuk mengover 11 kecamatan. Khusus pada Bidang Pemberdayaan Perempuan, hanya terdapat 5 orang personel (termasuk 1 orang tenaga psikolog). Komposisi aparatur DP2KBP3A Kabupaten Melawi disajikan pada Tabel 2:

Tabel 2. Komposisi Pegawai DP2KBP3A Kabupaten Melawi Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Dra. Hj. Marniyati	Kepala Dinas	S1
2	Endang Susilawati, S.Sos., M.AP.	Sekretaris	S2
3	Olan Ningsah, SKM	Kabid PP dan PA	S1
4	Hj. Khairunisa, S.Sos., M.AP.	Kabid Dalduk KB dan KS	S2
5	Hj. Supriyanti, S.Sos.	Kasi Perlindungan Anak	S1
6	Hj. Sri Rusmiyati	Kasi Tumbuh Kembang Anak	SPK
7	Erlyta Drusila Pakpahan, S.Sos.	Kasi Keluarga Sejahtera	S1
8	Lego, S.Sos.	Kasi Keluarga Berencana	S1

9	Mariyanti, A.Md.Keb.	Analisis Keluarga Berencana	D3
10	Angela, A.Md.Keb.	Analisis Keluarga Sejahtera	S1
11	Eka Nur Oktavian Sari, SKM	Kasi Pemberdayaan Perempuan	S1
12	Emida Yakob, A.Md.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	S1
13	Paridah, S.E.	Staf	S1
14	Veramitha, S.Sos.	Staf	S1
15	Yuni Krismawati, A.Md.	Staf	D3
16	Herlina Bunga Tiniur, A.Md.Keb.	Pengelola Barang Pemerintah	D3
17	Desi Ratna Sari, S.Psi., Psikolog	Staf (Psikolog)	S1
18	Firma Irfansyah	Bendahara	SMA

Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Melawi (2024)

Kekurangan jumlah personel teknis dan terbatasnya sarana kerja menuntut pegawai untuk menjalankan beban kerja ganda (overload). Solusi jangka pendek yang dilakukan dinas adalah memaksimalkan potensi SDM yang ada dan mengajukan usulan penambahan aparatur kepada BKPSDM Kabupaten Melawi.

4. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara sederhana dengan membandingkan target kuantitatif dan realisasi program. Secara umum, pencapaian kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dikategorikan "Cukup Baik" (berada pada kisaran 70% hingga 80%). Data indikator kinerja pembangunan daerah bidang pemberdayaan perempuan disajikan pada Tabel 3:

Tabel 3. Data Capaian Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Melawi

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian 2021	Capaian 2022
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	43,8%	45%
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	5%	5%
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	17%	17,97%
4	Rasio KDRT	0%	0%
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	60,4%	56,7%
6	Cakupan perempuan/anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	75%	85%
7	Cakupan perempuan/anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan	84%	88%
8	Cakupan penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	78%	85%

9	Cakupan penanganan bantuan hukum bagi perempuan/anak korban kekerasan	80%	89%
10	Cakupan layanan pemulangan korban kekerasan	68%	80%
11	Cakupan layanan reintegrasi sosial korban kekerasan	75%	88%

Sumber: Dokumentasi Penelitian DP2KBP3A (2024)

Meskipun capaian penanganan korban kekerasan dan peningkatan kualitas hidup menunjukkan tren positif, beberapa target strategis seperti predikat

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Penyusunan Program Kerja:** Penyusunan program kerja telah mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi kaum perempuan melalui mekanisme Musrenbang serta koordinasi intensif bersama mitra organisasi wanita (PKK, GOW, DWP).
2. **Pelaksanaan Program Kerja:** Program kerja telah terimplementasi dalam aspek pendidikan, gizi/kesehatan, ekonomi kreatif, serta advokasi perlindungan perempuan. Namun, jangkauan operasional masih terhalang oleh luasnya wilayah geografis dan minimnya sarana transportasi.
3. **Sumber Daya:** Ketersediaan SDM, anggaran operasional, serta sarana-prasarana pendukung kerja di DP2KBP3A masih sangat terbatas dan belum ideal untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Melawi.
4. **Capaian Kinerja:** Capaian kinerja secara umum dikategorikan cukup baik (70%-80%) dengan peningkatan signifikan pada layanan penanganan

Kabupaten Layak Anak (KLA) belum sepenuhnya tercapai akibat kurangnya optimalisasi sinergi antar-OPD dan mitra swasta.

korban kekerasan, meskipun program seperti Kabupaten Layak Anak memerlukan evaluasi dan pembenahan lebih lanjut.

Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. **Penguatan Penyusunan Program:** DP2KBP3A hendaknya meningkatkan jejaring komunikasi dengan merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama, serta memperluas pelibatan perwakilan perempuan hingga ke tingkat tapak.
2. **Peningkatan Skala Prioritas:** Pelaksanaan program hendaknya difokuskan pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga.
3. **Dukungan Sumber Daya dan Sarana:** Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi diharapkan memberikan alokasi anggaran operasional yang proporsional serta mengabulkan penambahan personel teknis dan fasilitas armada transportasi operasional.
4. **Optimalisasi Sinergi dan Sosialisasi:** Perlu dilakukan sosialisasi secara masif hingga ke pelosok desa serta memperkuat koordinasi lintas sektoral dengan pihak swasta dan

LSM guna menunjang capaian indikator kinerja pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2018). *Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Cattaneo, L. B., & Chapman, A. R. (2015). *The process of empowerment: A model for use in research and practice. American Psychologist*, 70(2), 158–169.
- Cornwall, A. (2016). *Women's empowerment: What works? Journal of International Development*, 28(3), 342–359.
- Ife, J. (2016). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice*. Cambridge University Press.
- Kabeer, N. (2017). *Gender equality, economic growth and women's agency: The endless variety and monotonous similarity of patriarchal grids. Feminist Economics*, 23(1), 1–28.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Nugroho, R. (2021). *Public policy: Dynamic policy analysis, formulation, implementation, and evaluation*. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.
- Rappaport, J. (2017). *Studies in empowerment: Introduction to the issue. Prevention in Human Services*, 3(2-3), 1–7.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Pearson.
- Siagian, S. P. (2003). *Fungsi-fungsi manajerial*. Bumi Aksara.
- Sutrisno, E. (2012). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana Prenada Media Group.
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. World Bank Publications.